

BAB I.
PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

1. Latar Belakang Masalah.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia banyak mengalami gangguan. Seperti terjadinya konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah Aceh, Papua, Maluku, Ambon, dan Poso. Kemajemukan bangsa Indonesia yang bercirikan etnik, adat istiadat, agama /kepercayaan, kondisi geografis dan sumber daya alam ternyata dapat menimbulkan masalah.

Kemajemukan etnik melekat pada kemajemukan geografis, sehingga terpatritri dalam pikiran kita bahwa Pulau Jawa sebagai tanah asli suku Jawa, Madura sebagai tanah asli suku Madura, daerah Tapanuli sebagai tanah asli suku Batak, Aceh sebagai tanah asli suku Aceh, dan seterusnya. Etnis Tionghoa digolongkan sebagai pendatang atau migrasi (bukan penduduk asli) karena tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang diakui sebagai asal etnis ini. Karena itulah muncul masalah pembauran ini, yang banyak dipermasalahkan para pengamat politik Indonesia akhir-akhir ini.

Kondisi kemajemukan Indonesia bila tidak tersulam dalam kesatuan mozaik kebangsaan yang erat, dengan perekat ketunggal ikaan, sifat kebangsaan akan mudah luntur dan terpecah belah. Sebagai negara kepulauan yang luas, lautan sebagai pemer-satu geografis daratan, nilai ke-Tuhanan yang Maha Esa, nilai tradisi gotong-royong, toleransi, rela berkorban dan nilai-nilai budaya lainnya adalah budaya pemersatu bangsa. Walaupun dijumpai sumber-sumber ketidakselarasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (disintegrasi). Di antaranya stereotip-stereotip negatif yang dapat menimbulkan permusuhan atau konflik, sukuisme yang akan memicu

pengkotak-kotakan, dan perbedaan lainnya. Maka untuk mempererat kesatuan dan persatuan (integrasi bangsa), semua keanekaragaman yang konstruktif tersebut dapat dikelola dengan bijaksana, demokratis, dan dinamis dengan mengacu kepada rambu-rambu hukum yang telah disepakati. Karena kegagalan integrasi dengan salah satu kelompok etnis, daerah, dan agama dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh lepasnya Timor Timur dari pangkuan Republik Indonesia telah memicu daerah lain ingin lepas, seperti Aceh, Papua dan Maluku. Sebagai bukti masih lemahnya perekat negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk etnik atau sukubangsa.

Mengenai WNI keturunan Tionghoa yang sering mempertentangkan antara pribumi dengan non-pribumi merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda peninggalan sejarah sosio politik di masa lalu. Yang terus berlanjut di era Soekarno dan Soeharto yang dijadikan pemicu kerusuhan anti etnis Cina pada setiap terjadi peristiwa peralihan kekuasaan. Menurut Wibowo (1999: XXV), dampak dari politik adu domba yang paling serius adalah terjadinya deretan kerusuhan-kerusuhan rasial sejak Desember 1997, dan puncaknya pada tragedi Mei 1998. Sampai sekarang belum diketahui secara tepat berapa korban jiwa, belum terhitung juga mereka yang masih hidup tetapi mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Dapat dikemukakan teori kecemburuan sosial untuk menjelaskan peristiwa itu, tetapi tidak dapat disingkirkan pula fakta adanya sentimen rasial di sini. Ketika kecurigaan itu telah bertumpuk sedemikian tinggi, maka begitu ada pemicu, kecurigaan itu akan berubah menjadi amarah. Emosi ini tampak jelas pada tulisan-tulisan di pintu atau di dinding rumah milik orang-orang Cina, baik yang dijarah maupun yang tidak, pada peristiwa Mei tersebut. Dan kerusuhan pasca G 30 S PKI yang terjadi di Medan tahun 1966, diperkirakan juga banyak menjadikan

orang-orang Tionghoa yang menjadi korban kekerasan dengan tuduhan bersekongkol dengan komunis. Dan peristiwa lainnya yang memicu kerusuhan massal, cenderung menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran.

Menurut Tarmizi dalam Wibowo (1999:19) munculnya sikap anti Cina juga disebabkan adanya sikap diskriminasi pengusaha Tionghoa terhadap pekerja pribumi dalam penerimaan pegawai dan pembayaran gaji serta dalam hal hubungan usaha, sikap terhadap mitra kerja atau klen, di samping masih adanya anggapan tentang sikap sebagian WNI keturunan Tionghoa yang cenderung memperlakukan Indonesia sebagai tempat sekedar untuk mencari nafkah atau keuntungan. Menjadi pemicu ketegangan hubungan terhadap mereka, walaupun mereka telah berabad-abad lamanya berbaur bersama masyarakat Indonesia, hidup dari tanah dan air Indonesia dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Negara mereka tetap RRT, hanya secara statistik mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Dilihat dari esensi kesukuan mereka yang benar-benar kuat, kelihatan dalam sikap dan cara hidup mereka, budaya ke-Tionghoanya masih melekat erat dalam diri mereka, seolah tidak terpengaruh oleh budaya lokal.

Masalah pembauran WNI keturunan Tionghoa yang belum terselesaikan merupakan jawaban dari rangkaian peristiwa-peristiwa anti Cina yang kerap terjadi. Dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memikirkan kebijakan baru dalam menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya telah banyak penelitian dilakukan mengenai masalah WNI keturunan ini dan sudah sering menjadi topik pembicaraan dalam diskusi ilmiah atau seminar, namun belum ada tindak lanjut penyelesaiannya menyebabkan masalah pembauran atau asimilasi belum dapat dituntaskan.

Kerusuhan anti Cina menurut analisa sebahagian pengamat juga disebabkan masih terwarisinya sikap kelompok WNI keturunan Tionghoa generasi tahun 1930-an yang memiliki kecenderungan kuat untuk memisahkan diri (*segregative*) terhadap masyarakat bumi putra. Di antara mereka masih banyak yang tidak mampu berbahasa Indonesia (Melayu) dengan baik. Sikap ini masih terus berlanjut pada generasi pasca kolonial dan pasca G 30 S PKI, walaupun sudah banyak juga di kalangan mereka yang terpelajar (*intelektual*) yang dapat berintegrasi dengan baik. Tidak dapat disangkal kerawanan hubungan dengan masyarakat pribumi masih terjadi. Terutama disebabkan sikap eksklusif etnis Tionghoa yang terkesan merendahkan dan menutup diri telah menimbulkan sikap antipati di kalangan masyarakat bumiputera.

Menurut Sofyan Tan dalam Rahz (1999:144), hubungan antara warga etnis Tionghoa dengan warga asli dapat diibaratkan seperti api dalam sekam dari luar nampak sudah padam, tetapi begitu diamati lebih dalam masih dijumpai bara api yang jika disuatu saat dihembus angin akan mudah tersulut atau terbakar menjadi kobaran api yang besar. Dari berbagai pergolakan yang terjadi di tanah air seperti di kota Medan dan sekitarnya, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan lain-lain. Dalam beberapa sumber antara tahun 1994– 1998, yang diiringi tindak kekerasan, yang berlanjut pada perbuatan a-moral, dan perampasan harta benda, terhadap etnis Tionghoa, telah menggoreskan noda hitam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hasil studi Bruner dan MG.Tan dalam Warnaen (2001:36-37), menyebutkan dua sumber konflik utama antara golongan etnis, yaitu persaingan di bidang ekonomi dan perebutan kekuasaan. Tan melihat bahwa pertentangan yang bersumber pada persaingan di bidang ekonomi terjadi di antara golongan orang Tionghoa dan golongan orang Indonesia secara keseluruhan. Tionghoa

bisa menguasai jabatan-jabatan penting dengan jalan membentuk kerjasama yang disebut “Ali Baba” yaitu kerja sama antar pengusaha Tionghoa dan orang Indonesia yang berpengaruh.

Bruner melihat ketegangan dan persaingan ekonomi di Sumatera Utara. Di mana berbagai golongan etnis Indonesia bersatu menentang kegiatan usaha golongan Tionghoa yang semakin meluas, dan mereka bekerja sama dengan orang Tionghoa dari sepanjang selat Malaka di Malaysia dan dengan orang Tionghoa di Singapura. Dalam persaingan, orang Tionghoa cenderung bersatu dengan orang Tionghoa lainnya atas dasar keyakinan bahwa ada kesamaan di antara mereka, yaitu asal dari nenek moyang yang sama dan menganut adat istiadat Tionghoa yang sama pula.

Sadar atau tidak mengenai konsep orang Tionghoa sebagai pendatang, sebagai orang asing, atau bukan orang Indonesia, yang berkembang dalam kehidupan antar sukubangsa telah diambil alih dan dimantapkan pula oleh pemerintah Indonesia. Walaupun orangtua dari etnis Tionghoa itu adalah WNI, tetapi dia harus secara aktif menyatakan diri sebagai WNI keturunan asing. Yang pada masa pemerinrahan Orba diberi kode nomor khusus yang menandakan dia seorang Tionghoa. Sehingga orang Tionghoa telah menjadi obyek diskriminasi dan pemerasan, yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat kelurahan dan preman-preman setempat.

Persoalan asimilasi atau pembauran merupakan masalah yang kompleks dan urgen, meskipun pemerintah di masa Orba telah berupaya, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat proses asimilasi. Warga Tionghoa sendiri menanggapi kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebuah program asimilasi pemerintah yang memaksa orang Tionghoa untuk sepenuhnya berasimilasi ke dalam masyarakat

Indonesia. Misalnya mengenai pergantian nama dari Tionghoa ke Indonesia, tidak diperkenankannya merayakan kebudayaan Cina di tempat umum yang kemudian dicabut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Karena kebijakan ini dinilai banyak kalangan mengandung kelemahan, di satu sisi menginginkan agar etnis Tionghoa dapat melebur dengan pribumi, di sisi lain pemerintah sendiri masih diskriminatif. Menurut Suryadinata (1999;178) di masa pemerintahan Soekarno 1961 dan pemerintahan Orba tahun 1966, mengeluarkan peraturan untuk mengubah identitas etnis Tionghoa melalui perubahan nama menjadi nama Indonesia, walaupun perubahan nama ini tidak diwajibkan. Tetapi bagi sebahagian Tionghoa Indonesia dikenakan tekanan halus oleh pemerintah untuk mengubah nama mereka.

Sebenarnya telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun tokoh-tokoh dari warga etnis Tionghoa untuk mensukseskan asimilasi. Menurut Sofyan Tan dalam Rahz (1999:146), pemerintah melalui Bakom PKB dan direktorat Sospol Depdagri mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan terhadap warga Tionghoa dengan muatan materi tentang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan beberapa tokoh warga etnis Tionghoa menurut keyakinannya yang telah memeluk agama Islam seperti (H. Yunus Yahya, Hj. Siti Qomariyah, Alm. H. Karim Oey) yang giat berdakwah menganjurkan warga etnis Tionghoa untuk memeluk agama Islam sebagai solusi terbaik agar diterima warga asli yang mayoritas Islam. Di antara mereka yang telah memeluk agama Islam cukup dikenal dalam masyarakat adalah Muhammad Bob Hasan (pengusaha /mantan Menteri Perindustri), H. Yusuf Hamka (pengusaha muda), Anton Medan (mantan preman) yang menjadi Ustaz dan H. Verawaty Fajrin (mantan pebulu tangkis Indonesia). Juga

aliran asimilasi total yang dipelopori Sindunata yang memandang bahwa asimilasi baru akan terlaksana apabila warga keturunan melakukan asimilasi total dengan warga masyarakat di mana mereka tinggal. Dengan demikian adat istiadat warga etnis Tionghoa secara perlahan akan melebur ke dalam adat istiadat di lingkungan mereka bermukim yang dikenal dengan istilah “integrasi melting pot”. Dan pada akhirnya warga negara etnis Tionghoa tidak lagi menjadi komunitas tersendiri, tetapi lebur dan mengidentifikasi diri sebagai warga negara mayoritas. Contohnya etnis Tionghoa di Solo Jawa Tengah, umumnya tidak bisa berbahasa Tionghoa, mereka sangat fasih berbahasa Jawa (kromo/halus). Bahkan dalam keseharian mereka banyak yang mengenakan kain sarung dan gemar menyetel kaset wayang semalam suntuk.

Program asimilasi total juga diupayakan pemerintah Orde Baru melalui pendidikan yang dikenal “Sekolah Pembauran” (“Sekolah Asimilasi”), telah berjalan sejak tahun 1975 sampai sekarang. Dan belum ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan formal untuk sekolah-sekolah pembauran tersebut. Sehingga timbul pertanyaan, setelah ± 29 tahun berjalan, apakah program asimilasi tersebut masih relevan di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, apakah perlu ada kebijakan baru, merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian.

Lembaga pendidikan pada dasarnya dapat berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya. Dan pemerintah melihat sekolah sebagai suatu sarana wadah pembauran (*melting pot*) yang cukup strategis bagi generasi muda warga keturunan Tionghoa dengan penduduk asli. Maka pemerintah Orba ingin menjadikan sekolah (lembaga pendidikan) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas

(SMA) sebagai wadah pembauran. Gelazer & Moynihan (1963), dalam kepustakaan Antropologi, sekolah dapat dilihat sebagai sebuah *melting pot* dan dapat berfungsi sebagai wadah asimilasi dengan harapan agar kelompok tertentu (dalam hal ini WNI keturunan Tionghoa) dapat meleburkan (dirinya dan budayanya) kepada kelompok yang lebih dominan (dalam hal ini kelompok WNI asli).

Menurut Pelly (1995, 1996) Medan sampai tahun 2000-an, belum memiliki kesatuan budaya urban, antara lain karena kota itu tidak memiliki kelompok yang dianggap sebagai kelompok dominan (*dominan kultural group*) seperti orang Sunda di Bandung, orang Jawa di Solo, atau orang Bugis di Makassar, di mana kelompok-kelompok etnik ini dapat dijadikan rujukan kesatuan budaya. Medan merupakan konfederasi kelompok-kelompok etnik/ras yang dibakukan sejak zaman kolonial, baik dalam pengertian fisik dan budaya. Dengan *setting* budaya seperti itu, pemerintah merasa perlu menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah *melting pot*. Suatu program pemerintah Orba untuk mempercepat proses asimilasi melalui generasi muda WNI Tionghoa dengan WNI asli. Karena dalam sekolah-sekolah pembauran diharapkan siswa-siswa yang beragam etnis, budaya dan agama dalam berbagai aktivitas dan interaksi sosial akan terdorong untuk berintegrasi dan terjadinya asimilasi. Dan generasi muda WNI Tionghoa dapat melebur diri (budayanya) ke dalam budaya Nasional. Usaha-usaha kearah terjadinya proses asimilasi melalui lembaga pendidikan dapat dilihat dari aturan-aturan baku yang diterapkan di sekolah-sekolah pembauran tersebut.

Gagasan sekolah pembauran sebagai wadah asimilasi cukup beralasan, dengan adanya kekhawatiran pemerintah dan tokoh-tokoh nasional dengan berbagai latar sosial politik warisan penjajahan Belanda yang sengaja menciptakan ketegangan antara warga

Tionghoa dengan penduduk asli. Dari beberapa literatur mengenai masalah Cina dapat disimpulkan tentang keberadaan etnis Tionghoa pada masa penjajahan yang ditempatkan tersendiri dalam pelapisan sosial dan hukum yang berlaku pada mereka tidak sama dengan undang-undang bumi putra. Tionghoa digolongkan sebagai Timur Asing yang memiliki beberapa keluasaan lebih dari sekedar bangsa terjajah. Selain itu pemisahan berlaku secara fisik. Masyarakat Cina ditempatkan di daerah kantong-kantong kota yang disebut daerah pecinan. Mereka dibiarkan mendirikan sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar Tionghoa dan tetap memelihara adat istiadatnya. Pada setiap pecinan, pemerintah kolonial Belanda mengangkat pimpinan masyarakat atau konsul dari kalangan Cina yang berfungsi sebagai diplomat. Mereka diangkat dengan pangkat letnan, kapten, atau mayor Cina. Keadaan ini berlanjut setelah Indonesia merdeka, di mana setelah PD II berakhir Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia, dengan politik *divide et impera*-nya memanfaatkan keterasingan masyarakat Cina membantu memperlancar eksistensi penjajah Belanda berkuasa kembali di Indonesia, sampai terbentuknya RIS dengan negara-negara *federal* (negara bagian) di Indonesia.

Menurut Pelly (1983,1993) orang perantauan Tionghoa di Indonesia selalu dipakai sebagai “perpanjangan tangan” Belanda dalam upaya politik “pecah belah” (*divide at impera*) dalam menghadapi masyarakat pribumi, terutama di bidang ekonomi. Orang Tionghoa dianggap Belanda patner yang baik untuk menguasai perdagangan domestik, karena itu diberi peluang untuk menguasai strata perdagangan kelas menengah, sedangkan Belanda dan Eropa lainnya menguasai strata kelas atas yang meliputi ekspor-import, keuangan (perbankan) dan bidang konstruksi. Di samping itu pemerintah kolonial dapat memanfaatkan kedudukan orang Tionghoa sebagai

penyangga (*buffer*) antara orang Eropa dengan pribumi. Dalam posisi seperti itu orang Tionghoa merasa setingkat lebih tinggi dari orang pribumi yang harus puas berada pada strata paling bawah dari piramida masyarakat bisnis yang diciptakan Belanda waktu itu, (akan diuraikan lebih lanjut dalam bab y a d.).

Sekolah-sekolah pembauran berasal dari sekolah-sekolah asing (Cina). Disebabkan keterlibatan tokoh-tokoh Tionghoa dalam beberapa gerakan atau peristiwa yang dianggap mengancam keutuhan RI yang masih berusia muda, pemerintah segera mengantisipasi dengan mengambil kebijakan yang dianggap baik saat itu. Misalnya keterlibatan anggota Baperki dalam pemberontakan G 30 S PKI 1965, akhirnya pemerintah membubarkan sekolah-sekolah Cina yang dianggap berada di bawah pengaruh RRT. Pemerintah Orde Baru memiliki alasan kuat untuk menutup semua sekolah-sekolah berbahasa Cina, termasuk sekolah Ureca yang disponsori Baperki. Menurut Suryadinata (1984: 162) pejabat pemerintah menuduh Peking mendukung PKI melakukan kudeta, pada masa itu semua organisasi Tionghoa asing yang berafiliasi dengan Peking dinyatakan ilegal. Akibatnya anak-anak Tionghoa asing tidak boleh mengikuti pendidikan selama dua tahun. Baru awal tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.B12/Pres/1/1968 yang memberi izin untuk mendirikan sekolah. Pada tahun 1969 berdirilah Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK) yang disponsori oleh golongan swasta masyarakat Tionghoa. Sekolah-sekolah itu dinyatakan terbuka untuk orang asing dan warga negara Indonesia, tetapi siswa asing tidak boleh melebihi 40 % dari seluruh siswa yang terdaftar. Kurikulum sama dengan sekolah negeri dan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia serta guru dan kepala sekolah harus warga negara Indonesia yang disetujui oleh Menteri pendidikan. Di sekolah ini dibenarkan mengajar-

kan bahasa Cina beberapa jam dalam satu minggu, sekolah ini sifatnya sementara atau percobaan, masih bisa dirubah bahkan dihapuskan. SNPK ini berkembang dengan pesat, karena hanya sekolah inilah yang dapat menampung anak-anak Tionghoa asing dan yang sudah menjadi WNI. Menjelang akhir tahun 1973 di Sumatera ada 35 SNPK, perkembangan sekolah ini menimbulkan kewaspadaan pemerintah daerah setempat.

Menurut Pelly, (2002;2003), pada bulan Maret tahun 1974 semua SNPK di Sumatera ditutup dan diambil alih oleh pemerintah setempat, sebab dianggap melanggar peraturan pemerintah karena menggunakan media pengajaran bahasa Cina. Pada tahun 1975 SNPK dirubah menjadi Sekolah Nasional Swasta yang kemudian menjadi basis sekolah asimilasi (pembauran). Di Sumatera Utara, setelah menutup sekolah-sekolah yang berbau asing, dan menasionalisasikannya menjadi Sekolah Nasional Proyek Khusus. Berdasarkan Instruksi Presiden No.37/U/In/G/1967 untuk menampung murid-murid pada sekolah-sekolah yang dibubarkan tersebut yang diperkirakan berjumlah 273.000 orang, pemerintah mendirikan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK), dengan menggunakan semua aset bekas sekolah Tionghoa asing tersebut. Sekolah-sekolah ini diwajibkan mematuhi ketentuan atau persyaratan : (1) yang menjadi siswanya harus merupakan pembauran antara WNIA dengan WNI Asli, (2) bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia, (3) Bahasa Asing (Tionghoa) hanya sebagai salah satu mata pelajaran.

Dijelaskan Pelly, di Sumatera Utara misalnya berdiri 32 buah SNPK untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Akan tetapi, Kowilhan I (sebagai penguasa militer untuk Sumatera dan Kalimantan Barat waktu itu), melihat bahwa sekolah SNPK tersebut hanyalah merupakan sekolah-sekolah RRT gaya baru. Sebab itu Kowilhan menambah persyaratan baru untuk sekolah-sekolah SNPK ini antara lain dengan mewajibkan

komposisi murid-murid pada semua jenjang dan kelasnya 50 % WNI keturunan asing (selanjutnya disebut murid “Non-Pri”) dan 50 % WNI keturunan asli (disebut Murid “Pri”). Kemudian semua anggota pengurus Yayasan harus mendapat persetujuan (setelah diteliti) Laksusda/Kodam setempat. Dan setelah itu, sesuai dengan kesepakatan pemerintah pusat, pengelolaannya diserahkan Kowilhan kepada Kanwil P & K setempat (1974). Kanwil-Kanwil ini kemudian membentuk Tim Pembantu Pelaksana Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia (TPPAP3A) dengan SK Menteri P & K No. 044/P/75 tanggal 18 Maret 1975. Tim TPPAP3A Propinsi Sumatera Utara kemudian mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk sekolah-sekolah asimilasi tersebut sebagai berikut :

- 1) Sekolah asimilasi, dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan swasta, baik yang berlatar agama, seperti Islam, Kristen atau Katholik, maupun Yayasan Pendidikan Umum (Nasional).
- 2) Komposisi murid-murid harus 50 % WNI asli dan 50 % WNI asing.
- 3) Kurikulum: Kurikulum Nasional (harus sama dengan kurikulum sekolah negeri).
- 4) Bahasa pengantar: Bahasa Indonesia.
- 5) Dilarang mengajarkan Bahasa Tionghoa.
- 6) Guru-guru harus mendapat persetujuan Kanwil P & K setempat.
- 7) Pengurus Yayasan harus lulus skrining Laksusda /Kodam setempat.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai :

- a. Tingkat keberhasilan asimilasi di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pembauran di Medan dalam kurun waktu \pm 29 tahun.

- b. Program asimilasi pemerintah di bidang pendidikan tersebut masih terus berjalan atau tidak, dan apakah masih relevan untuk situasi saat ini atau perlu direformasi ?.
- c. Keberhasilan sekolah-sekolah pembauran sebagai wadah asimilasi (*melting pot*) atau sebagai wadah dalam proses integrasi generasi muda bangsa yang multi-etnik.

3. Tinjauan Teoritis

a. Pengertian Asimilasi

Asimilasi (*assimilation*) adalah “proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda; saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga masing-masing kebudayaan golongan-golongan tersebut berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran” (Kuntjaraningrat 1981:255). Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini golongan-golongan minoritas itulah yang mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya, dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan golongan mayoritas. Asimilasi : “penyesuaian atau peleburan sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar” (Yacub Al-Barry, 2001:27). Dalam hal ini golongan mayoritas dapat berfungsi sebagai sifat-sifat lingkungan sekitar yang dominan sebagai patron.

Para ahli antropologi pada umumnya berpendapat bahwa asimilasi merupakan suatu proses perpaduan atau peleburan yang menyeluruh dari sekelompok orang atau individu-individu ke dalam budaya lain, dan mengidentifikasi diri mereka dengan budaya tersebut. Dalam pemakaian yang lebih umum, asimilasi menunjukkan bukan

hanya peleburan dari satu pihak, melainkan peleburan atau pengambil alihan unsur-unsur budaya dari banyak pihak (*mutual absorption*). Dalam pengertian yang terakhir ini asimilasi mempunyai pengertian yang sama dengan akulturasi, yaitu : "suatu proses modifikasi melalui kontak antar budaya. Akan tetapi asimilasi menekankan pada peleburan yang menyeluruh (*ilminitation complete*) terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan identifikasi" (Pelly,1986).

Sebagaimana disebut Pelly (1986) yang dihimpun dari beberapa pendapat : Theodorson, (1969) bahwa peleburan budaya selalu terjadi dari kelompok minoritas (*sub-ordinated-group*) ke dalam kelompok yang lebih besar atau dominan (*superordinated group*). Fairchild (1925) bahwa dalam konsep sosiologi Amerika Serikat, konsep asimilasi berarti "Amerikanisasi", dan pendapat lainnya bahwa dalam proses asimilasi telah tercakup akulturasi. Simpson (1968) dalam konsep asimilasi dibedakan dengan akomodasi yaitu suatu proses saling memberi dan menerima dalam situasi yang kompromis. Park dan Burgess (1921) menekankan bahwa dalam asimilasi terjadi suatu proses antar penetrasi dan fusi di mana seseorang atau kelompok mengambil alih kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok lain dan dengan keterlibatan kehidupan bersama dalam dinamika sejarah, mereka terintegrasi ke dalam budaya kehidupan bersama.

Tampaknya, Park dan Burgess cenderung menempatkan asimilasi sebagai suatu proses dari satu pihak atau *unilateral assimilation*, bukan suatu proses dari dua belah pihak (*reciprocal fusion*). Pada proses *unilateral assimilation* ini pihak yang minoritas (kecil) meleburkan diri ke dalam budaya pihak yang mayoritas (besar). Biasanya

kelompok ini disebut sebagai penduduk asli. Nampaknya konsep *unilateral assimilation* inilah yang dianut oleh pemerintah Orde Baru.

Menurut Santosa (1983:35) asimilasi adalah suatu proses sosial dalam tarap kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara individu-individu atau kelompok untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dan dengan perbedaan-perbedaan tersebut kemudian saling mengadakan pendekatan timbullah sikap yang sama yang mungkin terjadi secara langsung dalam waktu yang cukup lama.

Asimilasi mengandung pengertian yang sama dengan akulturasi, artinya bahwa dalam proses asimilasi diawali dari suatu proses modifikasi melalui kontak antar budaya (akulturasi). Jadi akulturasi merupakan proses awal dari asimilasi kebudayaan, dan lancarnya akulturasi ini akan mempengaruhi proses asimilasi.

Akulturasi mengacu kepada pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling mempengaruhi antara kebudayaan yang mengadakan kontak, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Akulturasi : “Proses pertemuan unsur-unsur dari pelbagai kebudayaan yang berbeda-beda, yang diikuti dengan percampuran unsur-unsur tersebut, perbedaan antara unsur-unsur asing dengan yang asli masih tampak” (Soekanto, 1993:4).

Menurut Taib Abdullah, (1985:239), akulturasi melibatkan peminjaman unsur kebudayaan daripada kebudayaan yang lebih berpengaruh. Apabila suatu kelompok masyarakat bertembung dengan masyarakat yang lebih tinggi kebudayaannya dan lebih besar pengaruhnya, maka golongan masyarakat yang lemah akan menerima *traits*

(unsur) kebudayaan masyarakat yang besar itu tadi. Proses yang intensif daripada peminjaman ini iaitu hasil daripada pertembungan kuasa besar terhadap masyarakat yang belum maju.

“Akulturasi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, sebahagian mengadopsi secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebahagian berusaha menolak pengaruh itu. Hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota-anggota masyarakat yang berakulturasi ditandai oleh peminjaman atau pengadopsian (*bilingulisme*)” (M. Dahlan 2001:14).

Menurut Redfield, Linton dan Herskovist : “Akulturasi meliputi fenomena yang dihasilkan sejak dua kelompok yang berbeda kebudayaannya mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola kebudayaan salah satu atau kedua kelompok itu” (H. Lauer,2001:403). Mengenai jenis kontak, antara kedua kebudayaan menurut Lawer dapat dikategorikan antar sesama yang kuat dan yang lemah atau sama kuatnya. Dan akulturasi dapat terjadi bila kebudayaan relatif setara, seperti terjadi pada kasus kontak antara orang Spanyol dengan orang Indian Araukanian dari abad 16 hingga abad 17. Meskipun satu kebudayaan tidak dominan atas kebudayaan lain, akulturasi tetap dapat terjadi, dan adanya dominasi ekstrim dari masyarakat pendukung kebudayaan tertentu dapat membawa anggota masyarakat pendukung kebudayaan lain masuk ke dalam aktivitas budayanya.

Menurut Kuntjaraningrat, (1990:91) yang telah meneliti gejala akulturasi menyangkut “proses sosial” yang terjadi bila manusia dalam suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa

kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri. Selanjutnya menurut Linton dijelaskan Kuntjaraningrat bahwa ada dua masalah dalam akulturasi, unsur-unsur kebudayaan yang mudah berubah dan yang sukar berubah. Yaitu perbedaan antara bagian inti dari suatu kebudayaan (*covert culture*) yang sukar berubah terdiri dari : sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Dan bagian lahir dari suatu kebudayaan (*overt culture*) yang mudah berubah, adalah kebudayaan fisik seperti peralatan dan benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dalam memberi kenyamanan. Menurut Elsi C. Parsons (1936), sebagaimana disebut Kuntjaraningrat, (1990:98-99), dalam suatu masyarakat yang luas biasanya ada perbedaan (diversitas) vertikal dan horizontal. Diversitas vertikal menyangkut perbedaan kelas sosial atau kasta, dan diversitas horizontal menyangkut perbedaan suku bangsa, golongan agama dan golongan ras. Perbedaan diversitas ini berpengaruh kepada proses akulturasi. Dan gejala perbedaan dalam kecepatan, cara, dan jalannya perubahan kebudayaan antara *covert* dan *overt culture* karena perbedaan sosial-budaya, dan pengaruh eko-budaya tersebut di atas, para ahli antropologi Amerika menyebutnya proses akulturasi diferensial (*differential acculturation*).

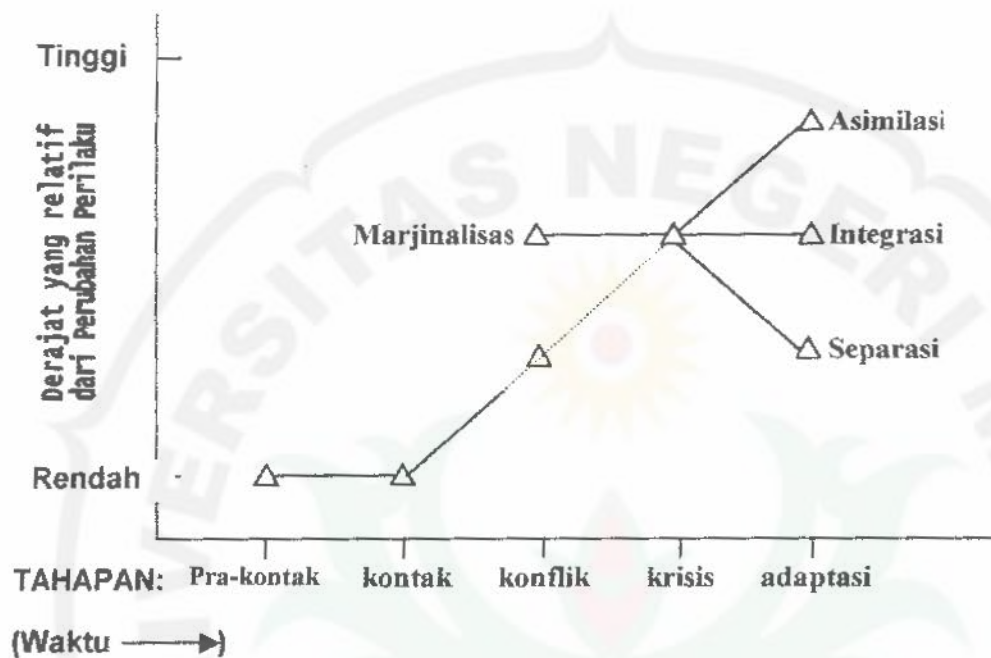
Dalam masyarakat dapat dipastikan ada individu-individu dengan watak kolot, tetapi ada juga individu-individu dengan watak yang progresif. Masalah yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah mengenai adanya individu yang lebih progresif

dari pada yang lain, dan masalah cara bagaimana merangsang agar individu-individu yang progresif dalam suatu masyarakat lebih menonjol, dan dapat mendorong terjadinya proses asimilasi. Melalui lembaga pendidikan dapat mendesain generasi muda suku-sukubangsa menjadi individu yang progresif tadi melalui perangkat-perangkat pendidikan yang didesain pula.

Menurut G. Spindler dan isterinya pada suku Indian Menomini sebagaimana disebut Kuntjaraningrat (1990:106) disimpulkan, bahwa dalam tiap masyarakat yang secara vertikal maupun horizontal terbagi-bagi dalam golongan sosial yang masing-masing mempunyai suatu sub-kebudayaan yang berbeda-beda, menerima, mengakomodasi, dan mengintegrasikan pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan intensitas dan cara yang lain, saling berbeda yaitu proses-proses yang differensial. Golongan yang paling lemah dan miskin akan lebih dominan mengakomodasikan unsur-unsur kebudayaan asing itu untuk kepentingan hidup mereka. Sebaliknya golongan yang kaya dan termasuk lapisan sosial yang tinggi, kepribadiannya kolot, takut kehilangan ketradisionalannya, mengkhawatirkan kedudukannya yang tinggi dalam masyarakatnya akan turut hilang. Dan fenomena semacam ini dari beberapa hasil penelitian dijumpai pada masyarakat warga keturunan Tionghoa di Indonesia.

Berikut ini adalah gambar suatu model sketsa dari beberapa periode atau tahapan akulturasi sampai terjadinya integrasi dan asimilasi secara evolusi. Setelah melewati tahapan-tahapan dalam suatu proses yang panjang yang tidak dapat diprediksi. Asimilasi dalam sketsa ini melalui suatu rintangan-rintangan, separasi (pengkotak-

kotakan) mungkin terjadi secara etnik, atau suku, ras, agama, golongan, dan marjinalisasi menuju suatu proses integrasi dan asimilasi.



Gbr 1. Derajat perubahan budaya dan psikologi sebagai suatu fungsi dari fase-fase dan varietas akulturasi (dimodifikasi dari Berry dan Kim,1999:548).

Beberapa jenis akulturasi menurut Barry dan Soekanto adalah :

- (1) *Acculturation antagonistic* : Pengambilan atau pengadopsian unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat tertentu oleh suatu masyarakat lain, dengan tujuan untuk mempertahankan diri terhadap masyarakat dan kebudayaannya yang diambil alih atau diadopsi tersebut.
- (2) *Acculturation planitational*: Proses bercampurnya unsur-unsur berbagai kebudayaan yang saling bertemu, yang terjadi dalam suatu wilayah yang luas.
- (3) Akulturasi terkendali : Proses pertemuan kebudayaan-kebudayaan yang didukung oleh beberapa masyarakat, di mana masyarakat penerima bersifat selektif.

- (4) *Accuturation unilateral*: Proses pertemuan dan percampuran unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat yang berbeda, di mana perubahan hanya terjadi pada salah satu kebudayaan saja dari yang berakulturasi tersebut.
- (5) *Acculturation bilateral* : Perubahan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat-masyarakat, yang mengadakan kontak sebagai hasil hubungan tersebut
- (6) *Acculturation linguistic* : Perubahan dalam bidang bahasa.

Menurut Gordon (1964) sebagaimana disebut Pelly (1986), memperinci proses asimilasi ke dalam 7 (tujuh aspek), yang dibedakanya berdasarkan variabel-variabel sosial budaya sebagai suatu proses asimilasi yang komplit, antara lain :

- (1) **Asimilasi budaya** : Suatu proses peleburan ke dalam budaya kelompok mayoritas (*host population*).
- (2) **Asimilasi struktural** : Suatu proses keterlibatan ke dalam pelebagaan (institusi) sosial, budaya, ekonomi dan politik pada tingkat yang prima, seperti perkumpulan sport, koperasi, kesenian, organisasi politik dan pendidikan.
- (3) **Asimilasi Amalgamasi** : Suatu proses kawin-mawin dalam jumlah yang besar, antara kelompok minoritas dengan mayoritas, yang disebut sebagai "*biological assimilation*" (asimilasi biologis).
- (4) **Asimilasi Identifikasi (Predikat diri)** : Suatu proses pertumbuhan "perasaan" suatu kelompok, satu bangsa dengan mayoritas.
- (5) **Asimilasi Sikap yang Positif** : Suatu proses perubahan sikap dari kelompok minoritas terhadap mayoritas kearah yang positif tanpa prasangka (*absence of prejudice*).

- (6) **Asimilasi Perilaku** : Suatu proses hapusnya diskriminasi kelompok minoritas dan mayoritas, baik diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, agama, maupun sosial ekonomi.
- (7) **Asimilasi civic** : Suatu proses kewarganegaraan dalam arti yang sesungguhnya, termasuk segi kejiwaan seperti loyalitas (kesetiaan), kesediaan berkorban, membela tanah air (patriotisme), kesatuan bangsa (nasionalisme), dan penghormatan (appresiasi) terhadap pemerintahan (peraturan, hukum, undang-undang) dan aparatnya.

Gordon menekankan dalam variabel ini dalam penjelasan Pelly, absennya konflik nilai dan kekuasaan (*absence of value and power conflict*). Ketujuh variabel ini merupakan skema konseptual untuk mengukur tingkat keberhasilan proses asimilasi yang telah berlangsung dalam masyarakat. Konsep variabel Gordon ini akan dijadikan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan proses asimilasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan (sekolah-sekolah pembauran) pada tingkat SMA yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Asimilasi

Dari berbagai proses asimilasi yang pernah diteliti para antropolog terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja, belum tentu terjadi proses asimilasi, kalau di antara kelompok-kelompok yang saling berinteraksi itu tidak ada toleransi dan simpati terhadap yang lain. Dan kasus serupa juga terjadi di Indonesia dengan etnis Tionghoa, yang telah bergaul secara luas dan intensif dengan orang Indonesia sejak berabad-abad lamanya, namun belum juga

dapat terintegrasi dengan baik ke dalam etnisitas masyarakat yang ada. Disebabkan minimnya sikap bertoleransi dan bersimpati. Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan golongan lain sering terhalang berbagai faktor: “(i) kurang pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi; (ii) sifat takut terhadap kekuatan kebudayaan lain; (iii) perasaan superioritas pada individu-individu dari satu kebudayaan terhadap yang lain” (Kuntjaraningrat 1981:256).

Menurut para peneliti di bidang antropologi proses asimilasi dipengaruhi oleh faktor demografi, ekologi, ras, etnis, struktur sosial, psikologis dan budaya.

Menurut Pelly (1996) faktor ras dianggap sebagai faktor yang relatif penting dalam suatu proses asimilasi. Apa yang terjadi antara orang-orang Negro yang berkulit hitam dan orang kulit putih di Amerika Serikat dan diberbagai kawasan benua lain. Pengalaman historis yang telah berabad-abad lamanya menunjukkan betapa faktor ras yang tampil karena perbedaan warna kulit dan bentuk fisik telah menjadi faktor penghalang proses asimilasi. Di Indonesia, faktor ras juga memegang peranan penting dalam proses asimilasi. WNI keturunan Cina dianggap berbeda ras dengan WNI asli. Perbedaan ras ini tidak hanya menunjukkan asal usul mereka secara historis, tetapi juga tampak nyata dalam bentuk tubuh dan warna kulit yang berbeda dengan penduduk Indonesia pada umumnya.

Selain faktor ras, faktor demografi, ekologi, struktur sosial, agama dan budaya turut menjadi faktor penghalang terjadinya proses asimilasi. Etnis Tionghoa di Indonesia sebahagian besar beragama Budha, Konfucionisme yang sangat berbeda dengan penduduk asli Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan Kristen. Adanya kecenderungan mereka yang kuat untuk tidak melakukan perkawinan ke luar (eksogami

dengan penduduk asli. Hidup dalam pemukiman yang *segragatif* (mengelompok) sehingga mereka secara ekologis memisahkan diri dari penduduk pribumi. Ke dua faktor ini erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnis mereka yang tertutup. Secara struktural orang Tionghoa sangat sukar menerima orang asing untuk menjadi anggota keluarga mereka, kecuali dengan perkawinan dan hubungan darah dari laki-laki (*unilateral descent group*). Perbedaan bahasa dan budaya pada umumnya telah turut pula memperbesar jarak sosial antara etnis Tonghoa dengan penduduk asli, di samping faktor historis selama perang kemerdekaan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Usaha untuk mengatasi faktor-faktor penghalang asimilasi telah diupayakan pemerintah termasuk melalui pendidikan. Diharapkan dalam arena lembaga pendidikan, faktor-faktor penghalang tersebut dapat dihilangkan secara optimal, sehingga proses asimilasi generasi WNI keturunan Cina dapat berjalan lebih baik. Adalah menjadi asumsi dasar pemerintah bahwa lembaga pendidikan mampu menciptakan kondisi ke arah itu, karena lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai arena pewarisan budaya (*cultural transmission*) akan dapat diwarnai dan dikendalikan sepenuhnya, ketimbang arena pewarisan lainnya di luar jalur pendidikan. Pemerintah Orde Baru mengharapakan sekolah-sekolah pembauran akan melahirkan generasi muda WNI keturunan Tionghoa yang mampu berasimilasi dan berintegrasi dengan suku-suku bangsa yang majemuk. Karena: “dalam lembaga pendidikan para pemuda dari berbagai suku bangsa, golongan keturunan asing, bertemu dan belajar bersama, sehingga dengan demikian perbedaan etnik diabaikan di situ” (Kuntjaraningrat 1993:27)

c. Etnik dan Etnisitas

Secara operasional sebuah kelompok etnik dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan manusia: “(a) yang mempunyai kesamaan bentuk (pola) tingkah laku yang *normative*, dan (b) merupakan bentuk dari suatu bagian populasi yang lebih besar, yang terintegrasi dalam kerangka kerja dari suatu sistem sosial”. (Pelly, 1995:95). Menurut D.L.Horowitz sebagaimana yang disebut D. Larry (1998;20a). Istilah etnik untuk menunjuk pada identitas kelompok yang sangat eksklusif (dan relatif berskala besar) yang didasarkan pada ide tentang kesamaan asal-usul keanggotaan yang terutama berdasarkan kekerabatan, dan secara khusus menunjukkan kadar kekhasan budaya. Etnik mencakup kelompok yang dibedakan oleh warna kulit, bahasa dan agama; etnik meliputi suku bangsa, ras, kebangsaan dan kasta. Meskipun sifatnya berdasarkan keturunan etnis tidak sepenuhnya bersifat abadi: batas-batas kelompok dapat berubah jika kelompok itu terpecah-belah, bergabung dengan kelompok lain, mengalami erosi, bersatu dan mendefinisikan kembali dirinya sendiri dari waktu ke waktu.

Etnisitas (kesukubangsaan) adalah fenomena sosial yang terdapat di negara maju maupun negara berkembang. Secara umum ada beberapa atribut yang terkait dalam pengelompokan etnisitas menurut Young (1979) sebagaimana yang disebut Pelly (1995:95). antara lain bahasa daerah, wilayah (*teritory*), tempat asal usul pemukiman, unit politik atau pemerintahan lokal, nilai dan simbol budaya bersama. Boleh saja salah satu dari atribut di atas tidak termasuk dimiliki oleh salah satu kelompok etnis tertentu, tetapi penggunaan bahasa daerah (etnis) dapat dikatakan merupakan identitas umum.

Kesukubangsaan merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan masalah psikologis, sejarah, ekonomi dan faktor-faktor politik. Menurut Barth (1969),

sebagaimana disebut Pelly, melihat kategori kesukuan (etnisitas) sebagai klasifikasi orang-orang dalam konteks “identitas umum yang paling dasar” (*basic most general identity*) ialah faktor-faktor “primordial” (bahasa daerah, adat istiadat, nilai-nilai simbolik, agama dan teritorial), yang ditentukan oleh asal dan latar belakang orang-orang itu. Orang berbuat dan bertindak sebagai anggota dari kategori etnis, sebab mereka mengidentifikasi diri mereka atau kadang-kadang diidentifikasi oleh orang lain dalam kategori etnis ini.

Menurut Parsudi Suparlan (2003), sukubangsa adalah sebuah pengorganisasian sosial mengenai jatidiri yang akskriptif ketika anggota sukubangsa mengaku sebagai anggota suatu sukubangsa tertentu karena dilahirkan oleh orang tua dari sukubangsa tertentu atau dilahirkan di dan berasal dari suatu daerah tertentu. Jatidiri suku bangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang atau diganti. Hal ini berbeda dengan jatidiri lain yang diperoleh seseorang dalam berbagai struktur sosial, kesukubangsaan tetap melekat dalam diri seseorang sejak kelahirannya. Meskipun jatidiri sukubangsanya tidak digunakan dalam interaksi, tetapi tidak dapat dibuang atau dihilangkan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, setiap orang dikenal dan saling mengenal kesukubangsannya melalui ciri-ciri fisik tubuhnya, dan ungkapan-ungkapan budayanya yang menjadi atribut dari jatidiri kesukubangsaan. Dalam hubungan antar sukubangsa, atribut kesukubangsaan adalah ciri-ciri fisik atau rasial, gerakan-gerakan tubuh atau muka, dan ungkapan-ungkapan kebudayaan, nilai-nilai budaya serta keyakinan keagamaan. Sadar atau tidak, seseorang akan hidup dengan berpedoman pada kebudayaan sukubangsanya. Proses pembelajarannya berlangsung dalam pendidikan informal sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

Dalam penelitian Barth (1988: 10), menemukan dua hal *Pertama*, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain perbedaan antar-etnik tidak ditentukan oleh tidak terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan. *Kedua*, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, dan penting antara dua kelompok etnik yang berbeda, karena adanya status etnik yang terpecah dua (terdikotomi). Dengan kata lain, ciri masing-masing kelompok etnik yang berbeda-beda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi didasari oleh terbentuknya sistem sosial tertentu. Interaksi yang demikian tidak akan mengakibatkan perubahan budaya dan akulturasi, perbedaan-perbedaan budaya ini justru akan bertahan walaupun terjadi hubungan antar etnik dan ada saling ketergantungan antar etnik (kasus Cina Indonesia). Asumsi yang mengatakan bahwa tiap suku atau bangsa mampu mempertahankan budayanya dengan cara tidak mengacuhkan suku atau bangsa-bangsa tetangganya. Walaupun faktor isolasi geografis dan isolasi sosial merupakan faktor utama untuk mempertahankan budaya suatu suku bangsa.

4. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

- a. Andayani, Trisni, (1995), dalam penelitiannya tentang, Pengaruh Pola Pemukiman Etnis Cina Terhadap Integrasi dengan Masyarakat Sekitarnya di Medan, yang menemukan ada pengaruh pola pemukiman etnis Tionghoa yang membaur, setengah membaur, dan terpisah terhadap integrasi dengan masyarakat sekitarnya.

- b. Anak Ampun, Nuh, (2002), penelitiannya tentang, Sikap WNI Keturunan Cina Terhadap Pembauran di Pemko Medan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional, menemukan sikap WNI keturunan Cina terhadap pembauran masih dijumpai kendala, demikian juga dari etnis-etnis WNI asli.
- c. Pelly, Usman. (1985-1986), dalam penelitiannya tentang, Masalah Asimilasi Antara Pelajar Pribumi dan Non-Pribumi pada Sekolah Pembauran yang Berlatar Keagamaan dan Umum, menemukan bahwa pelajar yang diasuh di sekolah pembauran yang berlatar keagamaan lebih tinggi tingkat asimilasinya (pembauran) daripada pelajar yang diasuh oleh yang berlatar umum.

5. Metode Penelitian

a. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Medan, sebagai pusat kota Provinsi, yang masih rentan terhadap konflik anti Cina di Sumatera Utara. Subyek penelitian adalah proses pembauran (asimilasi) di sekolah-sekolah pembauran, dan obyek penelitian adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di beberapa sekolah di tingkat SMA yang dipilih sebagai obyek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di 5 (lima) sekolah, yaitu SMA Methodist (SMA MTD), SMA Amir Hamzah (SMA AH), SMA Sultan Iskandar Muda (SMA SIM) SMA Santo Thomas (SMA S T), dan SMA Jenderal Sudirman (SMA J S).

b. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana telah diprogram pemerintah dalam kebijakan asimilasi pendidikan melalui sekolah pembauran, dirasa perlu dilakukan penelitian apakah ada pengaruh

sekolah-sekolah pembauran ini dalam rangka mengintegrasikan suku-suku bangsa yang majemuk, penulis merumuskan suatu judul masalah penelitian :

"Pengaruh Sekolah Pembauran Dalam Kerangka Integrasi Bangsa Yang Multietnik : Suatu Kajian Terhadap Program Asimilasi Pemerintah Orde Baru dalam sekolah pembauran di Medan".

Sejak berdirinya sekolah Pembauran tahun 1975 lebih kurang 10 tahun berjalan (1985) yang lalu, penelitian mengenai tingkat asimilasi pertama kali telah dilakukan Usman Pelly yang menyimpulkan bahwa asimilasi di sekolah-sekolah pembauran itu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Penulis melakukan penelitian ini lebih lanjut akan melihat hasilnya apakah ada peningkatan atau tidak. Selain itu penulis ingin mengetahui lebih jauh keberadaan sekolah-sekolah pembauran ini masih relevankah dalam situasi sekarang atau perlu direformasi.

Dari 5 (lima) sekolah yang diteliti, tiga sekolah di antaranya termasuk sekolah yang pernah diteliti, dan dua sekolah lainnya tidak termasuk dalam penelitian tersebut.

Untuk memfokuskan masalah penelitian ini, telah dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah sekolah-sekolah pembauran berhasil sebagai wadah asimilasi (*melting pot*) antar etnik, khususnya Tionghoa sebagaimana diharapkan dalam program pemerintah tersebut ?
- 2) Apakah program asimilasi pemerintah di bidang pendidikan tersebut masih terus berjalan sebagaimana mestinya, dan masih relevankah untuk saat ini ?
- 3) Apakah sekolah-sekolah pembauran sebagai wadah asimilasi (*melting pot*) berhasil dalam proses integrasi generasi muda bangsa yang majemuk etnik ?

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis merasa perlu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara terstruktur dan non terstruktur yang dapat memotivasi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya atau persepsinya dan juga melalui pengamatan lapangan (observasi).

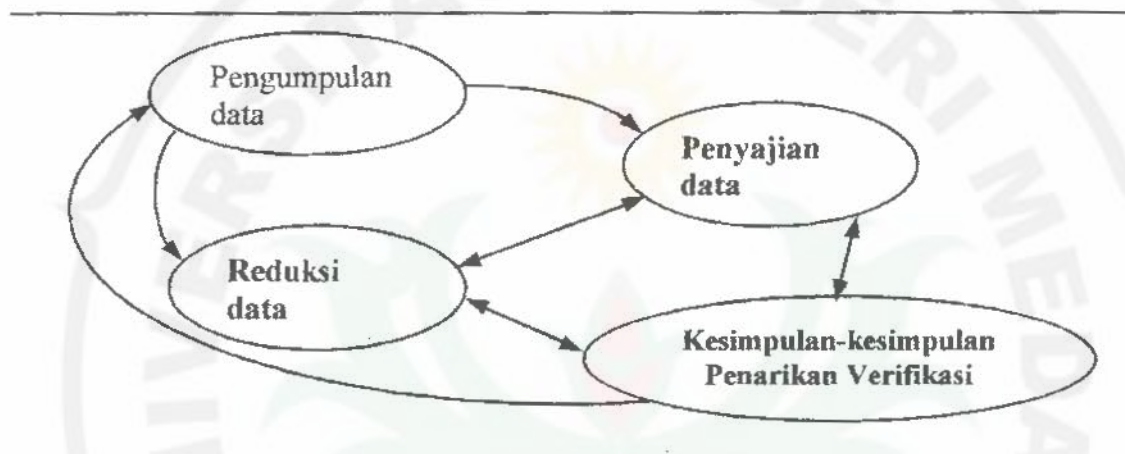
c. Teknik Pengumpulan Data.

- 1) Wawancara berstruktur dan non berstruktur diperlukan untuk menjangkau data dan informasi sebanyak-banyaknya dari informan atau responden yang diambil dari siswa-siswa SMA. Informan /responden utama adalah siswa-siswa dari etnis Tionghoa dan pendukung adalah siswa-siswa dari etnis asli, serta pengasuh sekolah dan guru-guru. Format wawancara dipersiapkan berstruktur (kuesioner) dan non berstruktur untuk wawancara terbuka (terlampir).
- 2) Observasi, diperlukan untuk melihat, mengamati dan melibatkan diri secara langsung kepada subyek dan obyek penelitian, bagaimana fenomena kehidupan siswa-siswa di sekolah-sekolah pembauran. Berkenaan dengan masalah penelitian dalam tujuh aspek proses asimilasi tersebut agar terekam dengan baik dipersiapkan format pengamatan (lihat lampiran II).
- 3) Studi Kepustakaan, mencatat dokumen-dokumen antara lain data-data tertulis, makalah/laporan penelitian, survey, literatur dan artikel-artikel dari koran, majalah yang dirasa perlu dan terkait dengan masalah penelitian.

d. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris (kualitatif) yang bermaksud mengamati gejala-gejala psikologis sekelompok siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari segi metodologis proses penelitian mengacu pada model interaktif Miles Matthew B. dk. (1992:20) bahwa setelah proses pengumpulan data dilakukan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: “ reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan /verifikasi. Sebagaimana tertera pada gambar berikut :



Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif (dimodifikasi dari Miles dan Huberman 1992: 20).

Dijelaskan Miles (1992:16), Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (hasil kuesioner, wawancara dan pengamatan). Reduksi data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa

hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Bersamaan dengan reduksi data, dilakukan penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, karena penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur dan non terstruktur untuk memudahkan analisis akan disajikan dengan menggunakan tabulasi data.

e. Verifikasi /Menarik Kesimpulan

Sesuai dengan sifat penelitian model interaktif, maka data primer yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara bersamaan (lihat gambar 2) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan /verifikasi, yang di distribusikan dalam bentuk tabel atau matriks. Data-data yang diolah ke dalam bentuk tabel-tabel deskriptif dengan menggunakan persentase adalah data yang dijarah dari angket akan dianalisis secara bersama-sama dengan data-data yang diperoleh melalui instrumen wawancara dan pengamatan. Sehingga dengan demikian akan diperoleh gambaran akhir dari hasil penelitian sebagai kesimpulan akhir.

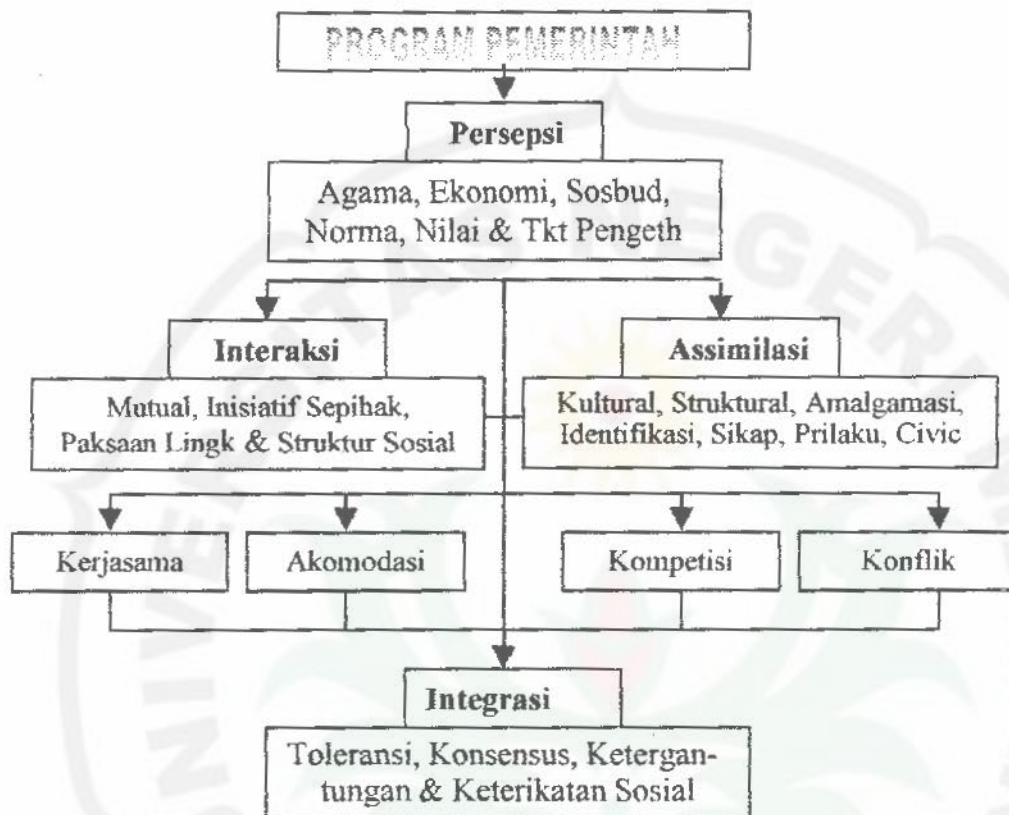
f. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran ganda kata kunci dalam penelitian ini, perlu dikemukakan definisi operasional yaitu :

1. Pengaruh adalah: daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perilaku seseorang; kekuasaan tanpa kekerasan atau paksaan.

2. Sekolah Pembauran adalah sekolah khusus bagi Siswa WNI keturunan Cina, yang diharuskan menerima siswa dari WNI Pribumi untuk membaur, agar membuka peluang terjadinya proses asimilasi budaya.
3. Asimilasi adalah suatu proses perpaduan atau peleburan yang menyeluruh dari sekelompok orang atau individu-individu ke dalam budaya lain, dan mengidentifikasi diri mereka dengan budaya tersebut; adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara individu-individu atau kelompok untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.
4. Etnik adalah kelompok suku/ras atau kelompok sosial dalam sistem sosial yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu; kelompok sosial yang memiliki kesamaan bentuk (pola) tingkah laku yang *normative* karena keturunan, adat istiadat atau kekhasan budaya, bahasa, agama, dan sebagainya; sebagai suatu bagian populasi yang besar terintegrasi dalam kerangka kerja dari suatu sistem sosial.
5. Integrasi Bangsa adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam sistem sosial dari sekelompok manusia bersamaan keturunan dan kebudayaan hidup dalam satu wilayah; kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; kesatuan kelompok teritorial dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama, mempunyai karakteristik yang sama, yang membedakan dari kelompok-kelompok lain yang sama.

g. Kerangka Konseptual



Gambar 3. Kerangka Konseptual

6. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada pemerintah daerah, etnis Tionghoa dan pada umumnya masyarakat Indonesia dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa (integritas bangsa) antara sesama etnis.
- 2) Bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya di Medan dalam membuat kebijakan menangani masalah pembauran yang relevan dengan situasi sekarang.
- 3) Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu antropologi sosial.